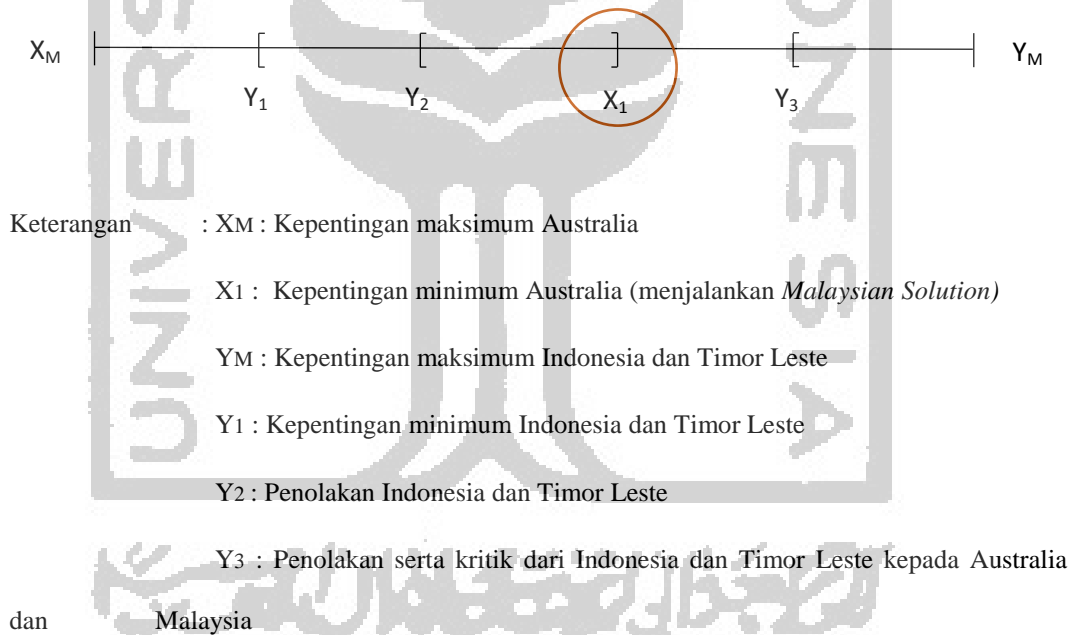


BAB III

KEGAGALAN KEBIJAKAN *MALYSIAN SOLUTION* PADA LEVEL DOMESTIK

Pada bab ini, penulis akan membahas variabel kedua dari *Two-Level Games Theory* yakni level kedua atau ranah domestik. Dalam kasus ini, ranah domestik adalah variable X di dalam *Two-level Games Theory*. Ranah domestik ini akan menjelaskan bagaimana respon dari beberapa aktor domestik terkait kebijakan *Malaysian Solution* sehingga kebijakan tersebut dinilai gagal dalam penerapannya. Seperti yang diperlihatkan pada gambar berikut:



Gambar 3. 1 Pemetaan Kepentingan Domestik (Putnam, 1988, p. 441)

Dari gambar di atas, dapat dijelaskan bahwa X_1 adalah kepentingan minimum Australia yaitu ingin mengatasi masalah penyelundupan dan perdagangan manusia dengan cara *Malaysian Solution*, dan X_m adalah

kepentingan maksimum Australia yaitu ingin mengatasi masalah *IMAs* yang terus meningkat di wilayah perbatasan Australia, serta memastikan bahwa orang-orang yang datang melalui jalur laut tersebut telah sah statusnya sebagai pengungsi setelah menjalani pemrosesan di Malaysia dalam kesepakatan *Malaysian Solution*. Akan tetapi, X1 (kepentingan Australia untuk menjalankan *Malaysian Solution*) bertentangan dengan variabel Y (Indonesia dan Timor Leste). Selain itu, pihak dalam negeri Australia juga mengkritik keras tindakan pemerintah yang tetap ingin menjalankan *Malaysian Solution* tersebut.

3.1. Kebijakan Australia terhadap *Irregular Maritime Arrivals*

Pada tahun 2010, tepatnya pada masa pemerintahan Perdana Menteri Julia Gillard, jumlah *Irregular Maritime Arrivals* yang memasuki wilayah Australia mengalami peningkatan yang signifikan, yakni sebanyak 6.555 orang. Berikut merupakan data yang menunjukkan peningkatan *IMAs* di Australia selama kurun waktu 2009-2011:

Tabel 3. 1 Jumlah Manusia Perahu yang memasuki wilayah Australia

Tahun	Jumlah Kapal	Awak Kapal	Jumlah Orang (Tidak termasuk awak kapal)
2009	60	141	2726
2010	134	345	6555
2011	69	168	4565

Sumber: (Spinks, 2013)

Dari tabel tersebut dapat diketahui bahwa jumlah peningkatan *IMAs* di Australia mulai terjadi sejak tahun 2009 dan tercatat sebanyak 2.726 orang. Kemudian pada tahun 2010, jumlah *IMAs* kembali mengalami peningkatan

sebanyak 6.555 orang, meskipun pada tahun 2011 sempat terjadi penurunan jumlah *IMAs* yakni sebanyak 4.565 orang.

Masalah penungsi di Australia seakan tidak pernah menemui titik terang. Setiap tahunnya Australia selalu kedatangan penungsi dan pencari suaka melalui jalur laut, sehingga camp pemrosesan lepas pantai di Australia sudah semakin penuh dan sesak, sementara itu proses legalitas status penungsi juga memakan waktu lama, sehingga terus terjadi penumpukan kapal-kapal penungsi dan pencari suaka di perbatasan Australia. Hal tersebut tentu tidak bisa dibiarkan begitu saja, karena dikhawatirkan akan mengganggu kesehatan mental dan fisik mereka jika terlalu lama terombang-ambing di lautan, serta akan menimbulkan kecaman dari pihak internasional jika Australia tidak segera mengambil tindakan untuk menangani masalah tersebut. Untuk menangani segala permasalahan imigrasi, pemerintah Australia memiliki *Department of Immigration and Citizenship (DIAC)* yang bertugas dan memiliki tanggungjawab dalam penjagaan perbatasan Australia dari gelombang imigran yang datang, departemen ini juga memiliki wewenang untuk menentukan apakah imigran yang masuk ke wilayah Australia itu legal atau tidak (Prabaningtyas, 2015, pp. 7-8).

Dalam menghadapi arus *IMAs* yang tidak terkontrol tersebut, Julia Gillard sebagai Perdana Menteri Australia lebih memilih untuk menutup perbatasannya demi menahan kapal-kapal *IMAs* yang semakin berdatangan, salah satunya dengan mengeluarkan kebijakan *Malaysian Solution* yang ternyata menimbulkan banyak kritik dan kecaman dari dunia internasional maupun domestik (Widodo, 2018, pp. 2-4).

Melalui kebijakan tersebut Perdana Menteri Julia Gillard secara tersirat telah menetapkan bahwa secara umum semua kapal-kapal para pencari suaka yang datang melalui jalur laut dianggap ilegal. Meskipun sebenarnya kapal-kapal tersebut datang dari negara-negara konflik seperti Afghanistan, Iraq, Iran, dan memang sebagian besar dari mereka benar-benar datang sebagai pencari suaka atau pengungsi yang seharusnya wajib diperhatikan dan diberikan perlindungan oleh Australia sebagai negara yang telah meratifikasi Konvensi Pengungsi 1951 (Wagiman, 2012, p. 215).

3.2. Tekanan Domestik

Australia merupakan negara yang menganut sistem pemerintahan terbuka, sehingga proses pengambilan kebijakannya juga banyak dipengaruhi dari berbagai pihak dan tuntutan-tuntutan domestik (Wesley, 2003, p. 39). Begitu juga halnya dengan kebijakan *Malaysian Solution*, mulai dari pembuatan kebijakan tersebut hingga kebijakan tersebut dijalankan.

Pemerintah Australia mengatakan bahwa pembuatan kebijakan *Malaysian Solution* diantaranya dengan dalih bahwa perjalanan yang ditempuh oleh para pengungsi dan pencari suaka dengan melalui jalur laut sangat membahayakan dan akan menjadi sia-sia (Anonymous, 2013, p. 4), karena dengan menempuh perjalanan yang penuh risiko tersebut pemerintah Australia tetap tidak akan menyediakan dan memberikan hak-hak sebagaimana yang seharusnya para pengungsi dan pencari suaka dapatkan dari negara yang menandatangani perjanjian dengan UNHCR dan Konvensi Pengungsi 1951 (Grattan, 2012). Padahal dengan kebijakan *Malaysian Solution* itu justru semakin membahayakan

para pengungsi dan pencari suaka karena mereka harus kembali melanjutkan perjalanan yang cukup jauh ke Malaysia. Kebijakan tersebut tentu menimbulkan reaksi dari kelompok-kelompok dalam negeri Australia, diantaranya dari oposisi politik dan masyarakat lokal.

3.2.1. Oposisi Politik

Dinamika politik yang terjadi di Australia terkait dengan masalah kedatangan manusia perahu yang terus mengalami peningkatan menjadi salah satu akibat dari masalah tersebut. Disetiap periodenya, perdana menteri yang berkuasa maupun perwakilan perdana menteri dari partai lain tentu memiliki pandangan dan kebijakannya masing-masing dalam merespon masalah kedatangan manusia perahu tersebut (Anggriawan, 2016, p. 251).

Perdebatan politik dalam negeri Australia juga selalu disertai dengan isu *IMAs*, dan berdasarkan dengan urgensi dari masalah tersebut, Australia harus mengeluarkan dana yang cukup besar untuk melaksanakan berbagai operasional kebijakannya, terutama untuk kebijakan yang berhubungan dengan negara lain, seperti dana untuk pembangunan kamp-kamp pemrosesan sementara bagi *IMAs* di beberapa negara. Pada Mei 2011, anggaran yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk menjalankan keamanan perbatasan sebesar AUD 23,8 juta (Schloenhardt, 2012, pp. 10-11). Selain itu, memindahkan para pencari suaka ke pusat-pusat pemrosesan terutama yang berada di Malaysia juga diyakini bukanlah sebagai solusi yang dapat bertahan lama (Purcell, 2008, p. 102).

Pandangan partai-partai yang ada di dalam parlemen Australia terhadap kebijakan *Malaysian Solution* dapat dilihat dari dinamika partai yang terjadi di

Parlemen Australia yang ke-43 atau lebih tepatnya pada masa pemerintahan Perdana Menteri Julia Gillard tahun 2010-2013 dimana terdapat delapan partai politik di dalamnya (yang mendapat suara dalam *House of Representatives*). Sebagai partai yang memperoleh kursi paling banyak di *House of Representative*, maka Partai Buruh Australia menjalankan fungsi pemerintah dalam parlemen Australia. Di sisi lain, peran oposisi diduduki oleh Partai Liberal. Semua undang-undang dan kebijakan yang dikeluarkan oleh Partai Buruh selaku pemerintah eksekutif, harus dipertanggung jawabkan dalam sesi *Question Time* di Parlemen dan akan dievaluasi langsung oleh Kabinet Bayangan yaitu pihak koalisi oposisi (Herdianzah, 2013, pp. 10-12).

Menanggapi kebijakan *Malaysian Solution* yang diusung oleh Partai Buruh sebagai langkah untuk mengatasi masalah *Irregular Maritime Arrivals*, terjadi perdebatan antara Partai Buruh dan Partai Liberal karena keduanya memiliki pandangan yang berbeda dalam melihat isu tersebut. Tony Abbot sebagai Ketua Partai Liberal dan Scott Morison sebagai Menteri Imigrasi dalam Oposisi mengatakan bahwa Julia Gillard tidak bisa membuat kebijakan yang lebih baik tanpa menimbulkan kontroversi untuk menekan kedatangan para pencari suaka yang tidak memiliki dokumen lengkap. Menurut Tony Abbot, Julia Gillard telah gagal dalam upayanya menangani masalah *IMAs* (Anonymous, 2012).

Dalam menanggapi kritik dari Tony Abbot dan Scott Morison, Perdana Menteri Julia Gillard mengatakan bahwa mekanisme perlindungan di level regional itu penting untuk dilakukan, dan merupakan cara yang sangat efektif untuk mengatasi *IMAs* di Australia pada khususnya, salah satunya yaitu dengan

menjalankan kerja sama dengan Malaysia dalam bentuk kesepakatan *Malaysian Solution* (Anonymous, 2010).

Di sisi lain, tentu terdapat kerugian material bagi Australia dan harus dipertanggung jawabkan oleh negara. Sebagai negara yang ikut menandatangani Konvensi Pengungsi 1951, tanggung jawab yang harus dilakukan oleh Australia adalah mengganti kerugian akibat pelanggaran, selain itu Australia juga harus memulihkan dan memberikan kembali hak-hak yang telah dilanggar oleh negara kepada para pengungsi dan pencari suaka (Triwibawa, 2014, pp. 8-9).

Pemerintah Australia dibawah pimpinan Julia Gillard beralih bahwa kebijakan *Malaysian Solution* itu dibuat dan dijalankan karena ada beberapa rekomendasi yang diberikan oleh *Expert Panel on Asylum Seekers* yang akhirnya diadopsi oleh pemerintah sebagai landasan dari pembuatan kebijakan tersebut, dan rekomendasi yang diadopsi antara lain adalah melakukan kerja sama dan melakukan perjanjian dengan Malaysia dalam isu pencari suaka, mengirim kembali perahu-perahu ke lautan, melakukan transfer pencari suaka ke negara lain, melakukan koordinasi dengan negara penampung pencari suaka lainnya, serta melakukan operasi anti penyelundupan manusia (Anonymous, 2012).

Dari rekomendasi-rekomendasi tersebut, pemerintah Australia melakukan amandemen *Migration Act* dan memberikan izin kepada Menteri Imigrasi terkait (Chris Bowen) untuk mendeklarasikan Malaysia sebagai negara ketiga dan menjadi *Regional Processing Country* dengan persetujuan legislatif (Anonymous, 2011). Akan tetapi, tindakan yang diambil berdasarkan dari rekomendasi-rekomendasi tersebut lebih terlihat seakan-akan pemerintah Australia melepaskan

tanggung jawabnya dari para pencari suaka dan pengungsi, dan terlihat seperti menghukum para pencari suaka yang datang melalui jalur laut, sehingga hal itu merusak hukum internasional terkait pengungsi dan pencari suaka yang telah diratifikasi sendiri oleh Australia (Prastya, 2015, p. 3).

Pemerintah berharap bahwa dengan mengambil tindakan yang keras dapat menghalangi para pencari suaka bepergian menuju Australia menggunakan kapal, serta dapat menahan rencana penyelundupan manusia (Holman, 2016, p. 1019). Dengan menaruh harapan pada kerja sama yang telah disepakati bersama Malaysia untuk dapat menangani dan menahan kedatangan *IMAs*, namun kebijakan ini malah menjadikan para pengungsi dan pencari suaka sebagai pekerja ilegal tanpa dokumen (Darmayani, 2017, p. 18), hal itu justru semakin menyiksa mereka karena kemanapun mereka pergi dan apapun yang mereka lakukan akan dianggap sebagai tindakan yang ilegal, dan tentunya semakin memperburuk citra Australia sendiri sebagai negara yang seharusnya memberikan perlindungan dan menjamin hak-hak para pengungsi dan pencari suaka tersebut.

3.2.2. Masyarakat

Mayoritas masyarakat Australia mendapat informasi terkait masalah *IMAs* adalah melalui pemberitaan media. Pemberitaan terkait masalah pencari suaka yang disampaikan oleh media cenderung menyudutkan pencari suaka yang datang dengan perahu, hal itu menyebabkan munculnya tuntutan masyarakat kepada pemerintah supaya dapat membuat kebijakan-kebijakan yang bersifat lebih tegas kepada para pencari suaka yang datang melalui jalur laut. Pada saat itu, urgensi yang digunakan oleh pemerintahan Perdana Menteri Julia Gillard adalah menarik

perhatian masyarakat Australia dengan memperlihatkan dan membangun citra bahwa pemerintah juga sedang berusaha keras untuk menghentikan arus IMAs, yaitu dengan menjalin kerja sama dengan Malaysia dalam *Malaysian Solution*, yang setidaknya kapal yang akan masuk ke wilayah Australia nantinya merupakan kapal yang berisi orang-orang yang statusnya sudah disahkan sebagai pengungsi selama menunggu di Malaysia (Prabaningtyas, 2015, pp. 72-73).

Seseorang dari kelompok Koalisi Aksi untuk Pengungsi di Australia, Ian Rintoul, mengatakan bahwa yang menjadi permasalahan utamanya adalah dengan mengirimkan para pencari suaka yang menggunakan perahu ke Malaysia untuk diproses. Menurut Rintoul, kebijakan tersebut merupakan suatu tragedi hak asasi manusia dengan memperdagangkan hak seseorang atau kelompok dengan kelompok lain. Yang lebih membuat Rintoul mengkritik keras kebijakan tersebut adalah karena pada faktanya, pemerintah tetap ingin dan akan mengirimkan anak-anak kembali ke Malaysia, hal itu jelas memperlihatkan bahwa pemerintah tidak menunjukkan kepedulian dan tanggungjawabnya terhadap para pencari suaka terutama anak-anak (Anonymous, 2011).

Kedatangan kapal-kapal pencari suaka dari berbagai negara juga sudah pasti memiliki alasan mereka tersendiri atau dikarenakan oleh beberapa faktor, seperti pengalaman pribadi yang menimbulkan ketakutan dan trauma, latar belakang sosial dan ekonomi, pendidikan, serta hal-hal lainnya yang membuat para pencari suaka itu terpaksa meninggalkan negaranya dan mencari perlindungan ke negara lain serta untuk mendapat kehidupan yang lebih layak. Semua itu merupakan alasan yang penting dalam memberikan pengaruh pada

sikap dari pihak-pihak yang dituju oleh pencari suaka dalam menghadapi para pencari suaka itu sendiri (Mishler, 1983, pp. 440-462). Oleh karena itu Australia seharusnya dapat lebih mempertimbangkan nasib para pencari suaka apabila mereka dikirim ke pusat pemrosesan di Malaysia. Kritik yang sama juga disampaikan oleh *The Refugee Council of Australia* yang menekankan bahwa tindakan yang dilakukan pemerintah Australia dengan melakukan kerja sama bersama Malaysia sebagai pihak ketiga dalam kebijakan *Malaysian Solution* merupakan langkah yang tidak tepat, karena para *IMAs* tidak memiliki dokumen perjalanan atau visa sehingga ancaman penganiayaan justru akan datang dari pemerintah itu sendiri (Crock, 2013).

Pemerintah Australia dinilai telah berusaha untuk menghindar dari kewajibannya sebagai pihak yang ikut menandatangani Konvensi Pengungsi 1951, karena tetap tidak mencabut status imigran ilegal kepada *IMAs* dan tidak mau memberikan pernyataan bahwa mereka adalah pengungsi atau pencari suaka yang memang membutuhkan bantuan, serta tetap memperlakukan mereka sebagai imigran yang ilegal dan membawa ancaman (Razak, 2018, p. 141).

Menerapkan “hukuman” tanpa mempertimbangkan dan melihat kembali kebutuhan serta kepentingan para pencari suaka yang datang melalui jalur laut, tentu juga sudah melanggar kewajiban negara (dalam hal ini Australia yang sudah berani berkomitmen sebagai anggota Konvensi Pengungsi 1951), yang seharusnya memastikan bahwa mereka memang merupakan orang-orang yang butuh pertolongan serta memberikan perlindungan hak asasi manusia setiap orang yang masuk ke wilayah Australia (Goodwin-Gill, 2003, pp. 187-188).

Pandangan lain juga disampaikan oleh ketua Komisi HAM Australia, Catherine Branson, yang tidak setuju dengan apa yang pernah disampaikan oleh Chris Bowen selaku Menteri Imigrasi. Menteri Bowen mengatakan bahwa anak-anak juga akan dikirim ke Malaysia demi kebaikan mereka dan untuk menunggu pemrosesan status pengungsi mereka, Bowen juga berpendapat bahwa perdagangan manusia dapat diperangi melalui cara ini (Glass, 2011). Namun menurut Branson, mengirim anak-anak ke pusat pemrosesan di Malaysia itu tidak bisa dikatakan sebagai langkah yang tepat demi kebaikan mereka, karena jelas bahwa Malaysia tidak bisa memberikan jaminan apapun terhadap kesehatan, pendidikan, dan hal lainnya (Anonymous, 2011).

3.3. Peran dan pengaruh Media

Media memiliki peran yang sangat penting dalam membentuk opini publik, begitu juga media di Australia yang memberitakan masalah *Irregular Maritime Arrivals* dan *Malaysian Solution*. Masyarakat umum lebih kepada mengandalkan media dalam mencari dan mendapatkan informasi tentang pengungsi dan pencari suaka, dengan memanfaatkan perhatian dari masyarakat tersebut, pihak media membingkai isu-isu *IMAs* dengan memilih gambar serta kata-kata yang memiliki *power* untuk membentuk opini dan menentukan sikap masyarakat dalam menanggapi isu tersebut (Samantha Cooper, 2017, p. 79).

Penggunaan bahasa atau kata-kata seperti ‘pencari suaka ilegal’, ‘ancaman keamanan’, serta ‘pendatang yang tidak sah’ membuat citra para pencari suaka semakin buruk dan terdiskriminatif (Razak, 2018, p. 140), kata-kata ‘ilegal’ mengindikasikan bahwa *IMAs* dapat disamakan dengan pelaku tindak kriminal

lainnya. Selain itu, julukan manusia perahu yang dipublikasikan untuk merendahkan derajat para pencari suaka seakan mereka juga tidak pantas untuk diperlakukan sama seperti masyarakat lokal pada umumnya. Media seringkali digunakan oleh pemerintah sebagai alat untuk memanipulasi dan membentuk opini publik terhadap para pencari suaka, media-media ini membentuk pemikiran atau gambaran dalam masyarakat terkait hak-hak para pencari suaka yang diabaikan padahal seharusnya hak-hak tersebut diterima oleh mereka dan dapat dipenuhi oleh negara tujuan mereka. Seperti yang terdapat pada *The Universal Declaration of Human Right* Pasal 13 ayat 1 dan Pasal 14 ayat 1 yang masing-masing berbunyi:

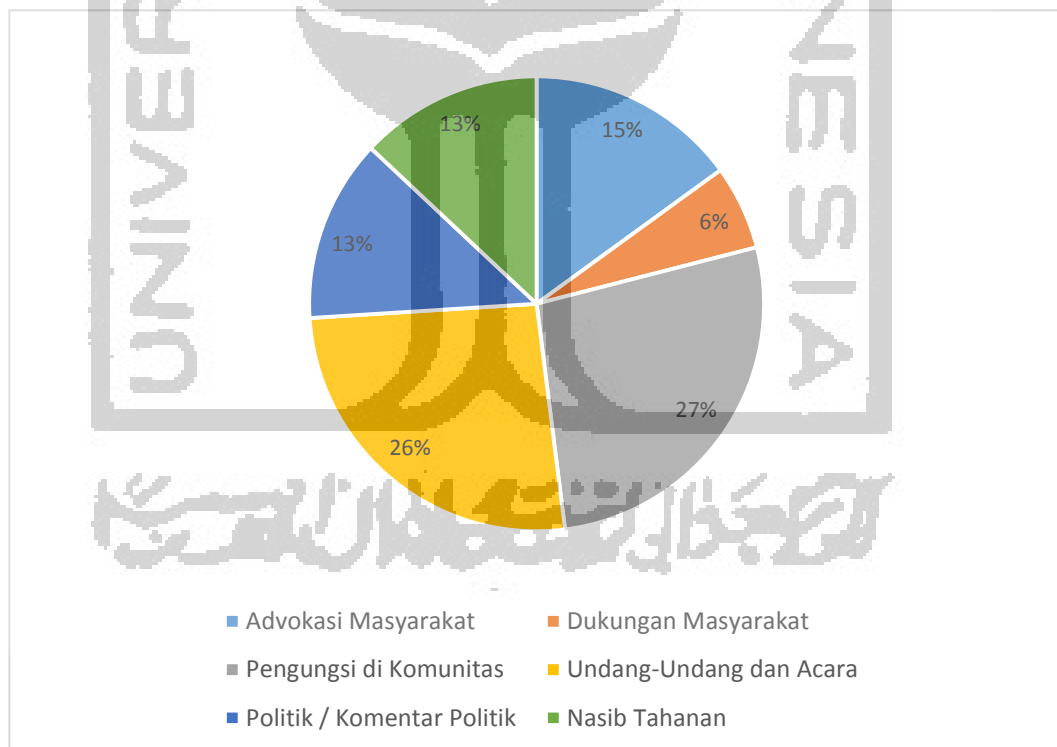
Pasal 13 (1): Setiap orang berhak atas kebebasan bergerak dan berdiam di dalam batas-batas setiap negara. Dan Pasal 14 (1): Setiap orang berhak mencari dan menikmati suaka di negara lain untuk melindungi diri dari pengejaran (Anonymous, 1998)

Untuk dapat memberikan informasi ke publik tentang pengungsi dan pencari suaka, media sering kali bergantung pada pemerintah terkait informasi mengenai pengungsi dan pencari suaka atau isu-isu yang menyertainya, karena sebenarnya masih kurangnya akses ke pencari suaka itu sendiri (Doherty, 2015, p. 31).

Jarak antara pencari suaka yang berada di kapal dan di lepas pantai atau laut dengan para wartawan media yang sangat jauh, serta kebijakan lepas pantai maupun pemukiman kembali di regional, membuat akses awak media ke narasumber langsung yang tidak dipengaruhi atau dikendalikan oleh pemerintah menjadi semakin terbatas (Katrine M. Turoy- Smith, 2013, pp. 179-195). Selain itu, para pencari suaka juga tidak bisa bebas berkomunikasi dengan awak media untuk menjelaskan situasi dan kondisi serta motivasi mereka, karena para pencari suaka tidak memiliki “power” untuk menciptakan kisah mereka sendiri, kisah

yang diciptakan dari orang-orang disekitar mereka akan lebih dipercaya (Healey, 2006, pp. 257-271).

Hal-hal yang diberitakan oleh media Australia terkait pencari suaka dianggap tidak sesuai dengan apa yang sebenarnya terjadi di lapangan, media menyampaikan bahwa *IMAs* adalah pelanggaran hukum. Dengan pemberitaan yang disampaikan sedemikian rupa, masalah manusia perahu atau *IMAs* kemudian banyak menarik perhatian dari masyarakat Australia, karena masalah imigrasi ini selalu menjadi topik utama dari data yang dikumpulkan oleh Media Monitors Australia, yang merupakan akumulasi dari seluruh media, yaitu pers, internet, televisi, dan radio (Maria Rae, 2017, pp. 479-490). Seperti yang terlihat pada gambar berikut:



Gambar 3. 2 Topik-topik yang diminati oleh masyarakat dari pemberitaan media (Samantha Cooper, 2017, p. 84)

Dari gambar di atas dapat dijelaskan bahwa sebanyak 27% masyarakat Australia tertarik terhadap isu pengungsi dan pencari suaka yang menjadi salah satu fokus paling penting di Australia. Jumlah itu lebih banyak 1% dari ketertarikan masyarakat terhadap topik-topik nasional lainnya termasuk undang-undang dan acara-acara lain.

Dari berita-berita atau informasi yang dikemas dengan sangat baik dan menarik oleh pihak media, membuat persepsi sebagian besar masyarakat Australia terhadap *IMAs* menjadi negatif. Masyarakat Australia memandang *IMAs* bahwa mereka sepenuhnya merupakan imigran ilegal dan bagian dari kejahatan tanpa memperdulikan bahwa sebagian besar dari mereka benar-benar pengungsi dan membutuhkan pertolongan. Padahal menurut laporan data dari *Department of Immigration and Citizenship (DIAC)*, sebagian besar dari *IMAs* yang tiba di Australia antara tahun 2010 hingga 2011 sebanyak lebih dari 90% merupakan pengungsi asli ((DIAC), 2013).

3.4. Tanggapan dari dalam negeri Malaysia (*Malaysian state actor*)

Dalam menghadapi masalah ini, tentu Malaysia memiliki kepentingan tersendiri dalam menjaga perbatasan wilayahnya dari penyelundupan manusia atau perdagangan manusia. Kontrol perbatasan ini menjadi perhatian yang sangat penting dalam menjaga kestabilan ekonomi, politik, dan kehidupan sosial yang dapat terancam dengan kedatangan kapal-kapal imigran yang jumlahnya semakin tidak terkontrol (O'Dowd, 2010, pp. 593-604). Tiap tahunnya tekanan yang diterima oleh pemerintah Malaysia terus mengalami peningkatan, pemerintah

Malaysia terus didorong untuk meningkatkan keamanan dan mempersiapkan tindakan dalam menghadapi masalah populasi imiran yang semakin besar.

Banyak negara-negara lain maupun organisasi-organisasi internasional yang mengkritik perlakuan Malaysia terhadap imigran selama ini, sehingga untuk mengatasi kritik-kritik dari dalam maupun luar negeri tersebut, pemerintah Malaysia mengamandemen UU yang disebut *Anti-Trafficking in Persons (ATIP)* pada tahun 2010 dan menambahkan kejahatan-kejahatan yang terkait dengan penyelundupan manusia. UU tersebut juga menetapkan bahwa orang-orang yang diperdagangkan tidak bisa melakukan penuntutan tindak pidana yang terjadi kepada mereka karena orang-orang tersebut masuk ke Malaysia secara ilegal atau memiliki dokumen palsu. Hukum yang berada dibawah *National Action Plan* 2010 tentang memerangi perdagangan manusia juga diubah, yang menyatakan niat pemerintah untuk memperkuat keamanan perbatasan dan meningkatkan kerjasama antara lembaga-lembaga pemerintah dan menciptakan aliansi yang strategis dengan negara lain, untuk meningkatkan jumlah tempat penampungan, dan untuk mengurangi jumlah pekerja asing (Ford, 2014, pp. 37-38).

Menteri Dalam Negeri Malaysia, Hishammuddin Hussein melalui Parlemen Malaysia mengatakan:

The amendment is necessary to deal with the current influx of illegal migrants from conflict countries who are seeking better life either in Malaysia or third countries and who, in particular, are using Malaysia as a transit point while they await their onward journey to possible countries. These migrants are distinct from trafficked persons in that they normally seek and finance the illegal migration themselves and the only danger of exploitation faced is cruel or inhuman or degrading treatment or being endangered in the course of their journey. Further, under international law, Malaysia is under a humanitarian obligation to ensure the safety of such migrants while they are on Malaysian territory. The influx of these illegal migrants also posed a security threat to Malaysia as their methods of entry and exit are generally illegal. (Ford, 2014, p. 38)

Dari penyampaiannya tersebut Hussein mengumumkan bahwa UU ATIP yang diamandemen dibuat sebagai pengakuan bahwa perdagangan manusia atau penyelundupan manusia memiliki kaitan yang erat dengan konteks buruh asing yang semakin banyak di Malaysia dan imigran gelap tanpa dokumen resmi juga banyak berkeliaran di lingkungan masyarakat.

Menteri Hussein mengatakan bahwa kerjasama yang ditandatangani bersama Australia terkait isu pencari suaka tersebut merupakan langkah awal yang baik untuk menahan dan mengatasi masalah perdagangan manusia di wilayah Asia-Pasifik (Glass, 2011).

